



**Kumham
JATIM**

RENCANA AKSI PERCEPATAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KEPMEN NOMOR M.HH-01.OT.01.01 TAHUN 2024

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



kumhamjatim



Kemenkumham_Jtm



Kanwil Kemenkumham Jawa Timur



Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

NOTA DINAS
Nomor : W.15-PR.01.03-15

Kepada Yth. : 1. Para Kepala Divisi
2. Kepala Bidang/ Bagian
3. Kepala Sub Bidang/ Sub Bagian

Dari : Kepala Kantor Wilayah

Hal : Penyampaian Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2024 Tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Tanggal : 31 Januari 2024

1. Rujukan

- a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
 - b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1664);
 - c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2024;
 - d. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. M.HH-09.OT.01.01 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - e. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2024 Tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada saudara untuk memenuhi data dukung Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dimaksud.
3. Terkait pemenuhan Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, diminta kepada saudara untuk :
- a. Melakukan rapat internal divisi untuk menyusun strategi percepatan pemenuhan data dukung Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024;

- b. Berkoordinasi dengan stakeholder internal maupun eksternal untuk percepatan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyesuaikan Rencana Kerja, Program Kerja, dan Kalender Kerja dengan Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
 - d. Melakukan monitoring secara berkala kepada jajaran dibawahnya.
4. Terkait data dukung pelaporan capaian Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dilaksanakan setiap tanggal 10 bulan berikutnya pada **link** yang akan kami informasikan lebih lanjut.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heni Yuwono

NIP 196506051988111001



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M HH-01 OT.01.01 TAHUN 2024

TENTANG

**RENCANA AKSI PERCEPATAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penetapan Rencana Aksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024, maka perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4916);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1664);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1630);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);
11. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2024;
12. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-09.OT.01.01 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG RENCANA AKSI PERCEPATAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.**
- KESATU** : Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan sarana pengendalian capaian kinerja prioritas dalam mencapai tujuan organisasi yang difaksanekan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KEDUA** : Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja bertujuan untuk:
1. Media untuk membangun komitmen dalam mencapai kinerja yang diharapkan dan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja organisasi;

2. Arah kebijakan dan strategi bersama dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja serta sebagai dasar kolaborasi pelaksanaan kegiatan dan sinergi dengan pemangku kepentingan;
3. Sarana untuk monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja.

KETIGA : Seluruh Kepala Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan dari Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024.

KEEMPAT : Laporan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Unit utama bertanggung jawab atas seluruh pelaporan capaian rencana aksi baik tingkat pusat maupun kantor wilayah;
2. Pelaporan capaian rencana aksi dilakukan dengan mengisi *matriks* serta bukti pendukung melalui *link* yang akan disampaikan kemudian;
3. Seluruh satuan kerja menyusun laporan tertulis hasil evaluasi mandiri (*self assessment*) terhadap pelaksanaan capaian rencana aksi;
4. Waktu pelaporan capaian rencana aksi dilaksanakan setiap bulannya pada tanggal 10 bulan berikutnya;
5. Evaluasi capaian Rencana Aksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan setiap semester melalui rapat koordinasi capaian kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KELIMA : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat memberikan sanksi administratif dalam hal:

1. Kepala Satuan Kerja yang tidak melaksanakan rencana aksi percepatan perjanjian kinerja;
2. Kepala Satuan Kerja yang telah melaksanakan rencana aksi percepatan perjanjian kinerja tetapi tidak memenuhi target kinerja yang telah ditentukan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2024

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



YASONNA H. LAOLY

MATRIK CAPAIAN RENCANA AKSI BIDANG ADMINISTRASI TAHUN 2024

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
SEKRETARIAT JENDERAL					
1	Evaluasi terhadap capaian kinerja tidak dilakukan seluruh satker secara periodik	Januari - Februari	Pendampingan penyusunan LKjIP	1. LKjIP Kemenkumham Tahun 2023 2. LKjIP UKE 1 Tahun 2023 3. LKjIP Kantor Wilayah Tahun 2023 4. LKjIP UPT Tahun 2023	Sub Bagian Program dan Pelaporan
3	Data pengembangan kompetensi Kemenkumham yang belum dilakukan secara keseluruhan	Januari-Februari	Pemutakhiran Data 2023 Indikator : (Data Kualifikasi Pendidikan, Data Kompetensi, Data Kinerja, Data Disiplin)	Laporan hasil pemutakhiran data 2023	Sub Bagian Kepegawaian, TU dan Rumah Tangga
		Januari-Februari	2. Pemetaan Data 2025 (Data Kualifikasi Pendidikan, Data Kompetensi, Data Kinerja, Data Disiplin)	Laporan pemetaan data 2025	Sub Bagian Kepegawaian, TU dan Rumah Tangga
		Januari - Desember	Implementasi Corporate University di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham minimal 25% pegawai per triwulan (Januari s/d Desember)	Laporan triwulan implementasi Corporate University di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham	Sub Bagian Kepegawaian, TU dan Rumah Tangga
4	Belum optimalnya nilai Indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran sehingga berpengaruh terhadap capaian IKPA	April - Juni	1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Triwulan I TA 2024; 2. Tindak Lanjut Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2024.	1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Triwulan I TA 2024; 2. Surat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2024 kepada Kantor Wilayah.	Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN
		Juli - September	1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Semester I TA 2024; 2. Tindak Lanjut Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester I TA 2024.	1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Semester I TA 2024; 2. Surat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester I TA 2024 kepada Kantor Wilayah.	Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN
		Oktober - November	1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Triwulan III TA 2024; 2. Tindak Lanjut Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III TA 2024.	1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Triwulan III TA 2024; 2. Surat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III TA 2024 kepada Kantor Wilayah.	Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN
5	Satuan Kerja Tidak Menyampaikan Usulan RKBMN	Juni - Juli	Kantor Wilayah melakukan pendampingan Pra Penyusunan RKBMN	Laporan Kegiatan Pra Penyusunan RKBMN	Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN
6	Satuan kerja belum menyampaikan Laporan Wasdal tepat waktu dan belum sesuai	Januari dan Juli	Menyusun Laporan Wasdal tingkat Wilayah Semester II Tahun 2023 dan Semester I Tahun 2024	Laporan Wasdal tingkat Wilayah Semester II Tahun 2023 dan Semester I Tahun 2024	Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN
7	Belum optimalnya kualitas nilai pengawasan kearsipan internal dalam pengelolaan arsip	Januari	Membuat SK Tim Pengawasan	SK TIM Pengawasan arsip Kantor Wilayah	Sub Bagian Kepegawaian, TU dan Rumah Tangga

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
	dinamis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Januari - Juni	Implementasi pengawasan kearsipan internal sesuai dengan LKE	Laporan implementasi pengawasan kearsipan internal	Sub Bagian Kepegawaian, TU dan Rumah Tangga
		Juli - Desember	Monitoring dan evaluasi hasil dari pelaksanaan pengawasan kearsipan internal	Laporan monev dan rekomendasi hasil pengawasan kearsipan internal	Sub Bagian Kepegawaian, TU dan Rumah Tangga
8	Penyelenggaraan Aplikasi Khusus di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum sesuai ketentuan Pasal 36 dan Pasal 39 Permenkumham 30/2021	Februari-April	Melakukan pendataan Aplikasi Khusus di lingkungan Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis melalui aplikasi Simdatin	Dokumen data Aplikasi Khusus di lingkungan Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis	Sub Bagian Humas, RB dan TI
		Maret-Juni	Melaksanakan rekomendasi hasil verifikasi dan uji kelaikan keamanan oleh Pusdatin	Dokumen perbaikan aplikasi	
INSPEKTORAT JENDERAL					
9	Pengawasan atas capaian Prioritas Nasional (PN) belum optimal dibuktikan dengan belum optimalnya kegiatan pengawasan APiP pada setiap Prioritas Nasional Kemendukham	Triwulan	Laporan Triwulanan evaluasi pelaksanaan dari Kanwil ke UKE I, UKE I ke Biro Perencanaan, Biro Perencanaan ke Itjen	Outcome : Capaian Program Prioritas Kementerian Hukum dan HAM tepat sasaran dan berdampak pada masyarakat Output / Data Dukung dari Itjen: Laporan APiP Hasil Evaluasi Capaian Prioritas Nasional di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Inspektorat Jenderal Sekretariat Jenderal Kantor Wilayah Unit Eselon I (Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum) *Akan Dikoordinasikan lebih lanjut dengan Unit Eselon I
		Triwulan	Evaluasi Triwulanan oleh Itjen		
		Triwulan	Penyampaian laporan di Minggu pertama setiap triwulan		
10	Penerapan integritas belum optimal dibuktikan dengan Indeks Integritas Kementerian Hukum dan HAM yang menurun berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas KPK	Sepanjang tahun	Glorifikasi peningkatan integritas dan budaya anti korupsi Satker yang diputar setiap hari (Berupa rekaman tentang budaya integritas)	Outcome : Meningkatnya Budaya Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang dibuktikan dengan perolehan Indeks SPI yang meningkat dari tahun sebelumnya (berdasarkan penilaian KPK) Output / Data Dukung dari Itjen: 1. Matriks Tindak Lanjut hasil Penilaian Integritas (SPI-KPK) Tahun 2023 2. Laporan Pelaksanaan Penguatan/ Sosialisasi atas Survei Penilaian Integritas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024	Inspektorat Jenderal Sekretariat Jenderal Kantor Wilayah Unit Eselon I (Sub Bagian Humas, RB dan TI) *Akan Dikoordinasikan lebih lanjut dengan Unit Eselon I
		Triwulan I	Tindak lanjut hasil SPI 2023		
		Triwulan II	a.Penetapan responden eksternal dan internal yang tepat b. Sosialisasi kepada responden eksternal		
		Triwulan III	Pelaksanaan Survei oleh KPK		
		Triwulan III	Hasil survei		

MATRIK CAPAIAN RENCANA AKSI BIDANG PELAYANAN HUKUM DAN HAM TAHUN 2024

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI	HASIL	PENANGGUNG JAWAB
DITJEN PP				
4	Peningkatan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, DPRD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.	<p>Januari</p> <p>Menetapkan SK Tim Pembagian Kelompok Kerja dalam proses Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi dan SK Pembagian Wilayah Kerja (Zonasi) Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan</p> <p>Februari</p> <p>Melakukan koordinasi kegiatankoordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemda Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota</p> <p>Maret- November</p> <p>Mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (memasukkan semua berkas ke dalam aplikasi SIPPDAH)</p> <p>Desember</p> <p>Penyusunan dan Penyampaian Laporan kegiatan Pengharmonisasian Raperda yang berasal dari Pemerintah</p>	<p>SK Tim Pembagian Kelompok Kerja dalam proses Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi dan SK Pembagian Wilayah Kerja (Zonasi) Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan</p> <p>Laporan Kegiatan hasil koordinasi dengan melampirkan: a. dalam hal Kanwil menyelenggarakan kegiatan rapatkoordinasi, data dukung berupa: undangan, daftar hadir, Notula, dan Dokumentasi; b. dalam hal Kanwil datang langsung ke Pemda Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/kabupaten/Kota, data dukung berupa: Surat tugas, notula dan dokumentasi</p> <p>Laporan kegiatan yang melampirkan: a. dalam hal kegiatan Pengharmonisasian,pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa: Raperda 1) Surat Permohonan Pengharmonisasian; 2) Penjelasan/Keterangan 3) Raperda yang telah mendapatkan paraf persetujuan dari Sekda dan Pemrakarsa 4) SK Tim Pembentukan Tim Penyusun Raperda 5) SK Pembentukan Propemperda beserta daftar lampiran Propemperda atau SK Keputusan bersama antara Kepala Daerah dengan Ketua DPRD yang menyatakan pembentukan rancangan di luar Propemperda. Raperkada 1. Surat Permohonan Pengharmonisasian 2. Penjelasan/Keterangan 3. Raperkada yang telah mendapatkan paraf persetujuan dari Sekda dan Pemrakarsa 4. SK Kepala Daerah Propemperkada beserta daftar lampiran Propemperkada atau SK Keputusan Kepala Daerah yang menyatakan pembentukan rancangan di luar Propemperkada. b. dalam hal kegiatan selain pengharmonisasian,pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa Surat tugas/daftar hadir notula dan dokumentasi</p> <p>Laporan Kegiatan Pengharmonisasian Raperda yang berasal dari Pemerintah Daerah,Raperda yang berasal dari DPRD, dan Raperkada oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</p>	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Sub Bidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah)
DITJEN HAM				
2	Kurangnya pemahaman Masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pelaku Usaha terkait Bisnis dan HAM di Wilayah	<p>Januari</p> <p>Rapat Koordinasi terkait persiapan pembentukan Gugus Tugas Daerah (GTD) BHAM</p> <p>Februari</p> <p>Rapat penyusunan draft SK GTD BHAM</p> <p>Maret</p> <p>Pengukuhan GTD BHAM sesuai Perpres No. 60 Tahun 2023</p>	<p>Laporan hasil koordinasi persiapan pembentukan GTD BHAM</p> <p>Draft SK GTD BHAM</p> <p>SK GTD BHAM sesuai Perpres No. 60 Tahun 2023</p>	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Sub Bidang Pemajuan HAM)

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		April	Rapat Kesekretariatan GTD BHAM	Laporan Rapat Kesekretariatan GTD BHAM	
		Mei	Pelaksanaan Bimtek terkait Stranas Bisnis dan HAM	Laporan Bimtek Stranas Bisnis dan HAM	
		Juni	Pelaksanaan Bimtek terkait Stranas Bisnis dan HAM	Laporan Bimtek Stranas Bisnis dan HAM	
		Juli	1.a. Pelaksanaan Bimtek terkait Stranas Bisnis dan HAM 1. b. Pendampingan Pelaksanaan Uji Tuntas melalui Pengisian Aplikasi PRISMA	1.a. Laporan Bimtek Stranas Bisnis dan HAM 1. b. Laporan pendampingan	
		Agustus	1. Pelaksanaan Bimtek terkait Stranas Bisnis dan HAM 2. Pendampingan Pelaksanaan Uji Tuntas melalui Pengisian Aplikasi PRISMA	1. Laporan Bimtek Stranas Bisnis dan HAM 2. Laporan pendampingan	
		September	1. Pelaksanaan Bimtek terkait Stranas Bisnis dan HAM 2. Pendampingan Pelaksanaan Uji Tuntas melalui Pengisian Aplikasi PRISMA 3. Pelaksanaan Penanganan Pengaduan permasalahan BHAM	1. Laporan Bimtek Stranas Bisnis dan HAM 2. Laporan pendampingan 3. Laporan Pelaksanaan	
		Oktober	1. Monitoring dan Evaluasi Capaian Aksi dan Implementasi Pelaksanaan Stranas BHAM 2. Pelaksanaan Penanganan Pengaduan permasalahan BHAM	1. Laporan Monitoring Capaian Aksi dan Implementasi Bisnis dan HAM Daerah 2. Laporan Pelaksanaan	
		November	1. Evaluasi Capaian Aksi dan Implementasi Pelaksanaan Stranas BHAM Daerah 2. Pelaksanaan Penanganan Pengaduan permasalahan BHAM	1. Laporan Evaluasi Capaian Aksi dan Implementasi Pelaksanaan Bisnis dan HAM Daerah 2. Laporan Pelaksanaan	
		Desember	1. Penyampaian Laporan Monev dan Tindak Lanjut Aksi serta Implementasi Pelaksanaan Bisnis dan HAM Daerah 2. Evaluasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan BHAM	1. Laporan Monev dan Tindak Lanjut serta Implementasi Aksi Bisnis dan HAM Daerah 2. Laporan Evaluasi dugaan pelanggaran/permasalahan BHAM	
BPHN					
2	Belum adanya Dasar Hukum yang kuat, sehingga antusias/partisipasi Pemerintah Daerah kurang mendukung baik dalam sarana dan prasana (tidak tersedianya anggaran khusus untuk melaksanakan kegiatan tsb)	Maret	1. Rapat persiapan 2. Surat usulan penyampaian Desa/Kelurahan yang akan dijadikan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Binaan disetiap wilayah	1. Surat undangan rapat (Undangan, Absensi, Notula, Gambar/Dokumentasi) 2. Surat usulan Desa/Kelurahan Binaan dari masing-masing wilayah	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum)
		Juni	1. Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Kadarkum di masing-masing wilayah 2. Penyusunan SK Kelompok Kadarkum yang ditandatangani oleh Camat/Lurah/ Kepala Desa 3. Implementasi kuesioner indeks desa/kelurahan Sadar Hukum dalam Dimensi Akses informasi Hukum	1. SK Kelompok Kadarkum yang ditandatangani oleh Camat/Lurah/ Kepala Desa 2. Laporan Pembentukan dan Pembinaan kelompok Kadarkum masing-masing wilayah (Undangan, Absensi, Notula, Gambar/Dokumentasi)	
		September	1. Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dimasing-masing wilayah 2. Penyusunan SK Desa/Kelurahan Binaan yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota 3. Implementasi kuesioner Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum dalam Dimensi Implementasi Hukum, Dimensi Akses Keadilan, Dimensi Akses Demokrasi	1. SK Desa/Kelurahan Binaan yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota 2. Laporan Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dimasing-masing wilayah (Undangan, Absensi, Notula dan Gambar/Dokumentasi)	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		Desember	Menyusun laporan capaian target Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Binaan dimasing-masing wilayah dan rencana usulan pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan tahun berikutnya	Laporan akhir capaian kinerja	
	Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh PBH harus dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran sesuai standar layanan bantuan hukum sebagaimana diamanatkan dalam UU Bantuan Hukum serta peraturan pelaksana lainnya. Capaian realisasi anggaran Bantuan Hukum setiap tahunnya terealisasi secara maksimal, namun dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum tidak hanya dari sisi realisasi anggaran tetapi yang lebih penting adalah terkait kualitas layanan bantuan hukum yang telah diberikan oleh PBH. Berdasarkan Indeks Kinerja PBH atas kualitas layanan bantuan hukum yang telah diberikan PBH kepada Penerima Bantuan Hukum yang telah dihasilkan melalui wawancara kepada Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan nilai persepsi atas pelayanan bantuan hukum yang diterimanya, pada tahun 2023 baru dilakukan penilaian kinerja PBH sebanyak 506 PBH dari 619 PBH atau sebesar 81.7 %. Sehingga penilaian kinerja PBH atas kualitas layanan bantuan hukum perlu ditingkatkan.	Juni	25% Pemberi Bantuan Hukum dilakukan Survey Layanan Bantuan Hukum terhadap Penerima Bantuan Hukum	1. Data penerima Bantuan Hukum yang dilakukan monitoring dan evaluasi dari aplikasi Sidbankum 2. Data PBH yang sudah dan belum di dilakukan monitoring dan evaluasi	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum)
		September	50% (B06: 25% + B09: 25%) Pemberi Bantuan Hukum dilakukan Survey Layanan Bantuan Hukum terhadap Penerima Bantuan Hukum	1. Data penerima Bantuan Hukum yang dilakukan monitoring dan evaluasi dari aplikasi Sidbankum 2. Data PBH yang sudah dan belum di dilakukan monitoring dan evaluasi	
		Desember	85% (B09: 50% + B12: 35%) Pemberi Bantuan Hukum dilakukan Survey Layanan Bantuan Hukum terhadap Penerima Bantuan Hukum	1. Data penerima Bantuan Hukum yang dilakukan monitoring dan evaluasi dari aplikasi Sidbankum 2. Data PBH yang sudah dan belum di dilakukan monitoring dan evaluasi	
	Belum meratanya sebaran Pemberi Bantuan Hukum (PBH) di kabupaten/kota. Sebaran PBH setelah verifikasi dan akreditasi periode tahun 2022 s.d. 2024 di setiap kab/kota baru sebesar sekitar 54% atau sebanyak 279 dari 514 kab/kota, hal ini berdampak pada akses pemberian bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang belum merata atau hanya hanya di kab/kota yang sudah ada PBHnya. Sehingga, pelaksanaan verifikasi dan akreditasi di Tahun 2024 untuk periode 2025-2027 diharapkan terjadi peningkatan sebaran PBH terakreditasi di setiap kab/kota dalam rangka pemerataan dan perluasan pemberian layanan bantuan hukum.	Maret	Penunjukkan Pokjada Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum	SK Tim Pokjada Verifikasi dan Akreditasi	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum)
		Juni	Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi (PBH baru)	Rekomendasi Akreditasi PBH Baru	
		September	Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi (PBH lama)	Rekomendasi Akreditasi PBH Lama	
	Data Aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (Sidbankum) 3 tahun terakhir perkara bantuan hukum litigasi rata-rata sebanyak kurang lebih 12.000 perkara dengan	Maret	Sosialisasi <i>Paralegal Justice Award</i>	Laporan Pelaksanaan sosialisasi	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Sub Bidang Penyuluhan

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
	<p>serapan anggaran APBN rata-rata 98,70%. Namun, dari jumlah perkara yang ditangani melalui layanan bantuan hukum didominasi dengan perkara pidana sebesar 70% dan perdata sebesar 30%. Adapun jenis-jenis perkara yang ditangani tersebut rata-rata merupakan perkara ringan yang timbul dari perselisihan antar warga di masyarakat yang tentunya dari wilayah pedesaan. Hal ini pun secara tidak langsung berdampak pada over capacity-nya jumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan yang berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) saat ini prosentase over capacity sebesar 109%.</p> <p>Di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peradilan di bawahnya terjadi peningkatan signifikan akan volume perkara dari tahun ke tahun dan hal ini tidak diikuti dengan peningkatan jumlah Hakim dan ASN baik di daerah maupun di pusat. Hal ini berdampak pada peningkatan beban kerja Hakim dan ASN di lingkungan peradilan serta prosentase penyelesaian perkara di lingkungan peradilan.</p> <p>Oleh sebab itu, penting peran Kepala Desa/Lurah sebagai juru damai dalam penyelesaian konflik di desa/kelurahan atau berperan sebagai Paralegal. Peran kepala desa/lurah bukan saja memiliki kapasitas sebagai pemimpin formal untuk menjalankan urusan-urusan administrasi pemerintahan, akan tetapi secara informal menjadi tokoh sentral yang dipatuhi oleh warganya, dan diharapkan menjadi pengayom yang dapat melindungi berbagai kepentingan desa dan menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan serta</p>	Juni	Pelaksanaan seleksi <i>Paralegal Justice Award</i>	Usulan peserta <i>Paralegal Academy</i>	Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum)
DITJEN AHU					
1	Belum tersedianya pemutakhiran data Fidusia dalam rangka peningkatan Kualitas layanan Fidusia dan Jumlah Pendaftaran Fidusia	Maret - November	Penyebaran informasi terkait dengan kewajiban penghapusan jaminan fidusia yang telah selesai masa di wilayah	Laporan Penyebaran informasi terhadap terkait pendaftaran, perubahan penghapusan Jaminan Fidusia kepada masyarakat, notaris dan lembaga pembiayaan di wilayah	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum)
2	Masih terdapat Ketidaksinkronan data Notaris antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Januari - Maret	Kantor Wilayah menghimpun data Notaris untuk dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, untuk kemudian dilakukan sinkronisasi dengan database Ditjen AHU	Laporan Hasil Konfirmasi Data Notaris antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum)
		Mei - Desember	Implementasi Migrasi Data Notaris	Database notaris yang telah sinkron antara Data Ditjen AHU dengan data yang tersedia di Kanwil	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum)
DITJEN KI					
1	Masih Rendahnya pemahaman masyarakat atas Indikasi Geografis mengakibatkan rendahnya permohonan Indikasi Geografis	Maret	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi dengan pemerintah daerah (dinas terkait) memetakan potensi IG yang ada di wilayah Inventarisasi produk IG terdaftar yang ada di wilayah setempat Identifikasi Pihak – pihak yang terkait dengan Penguatan kelembagaan dan pengawasan Indikasi Geografis 	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Koordinasi Daftar inventarisasi produk IG Daftar pihak-pihak terkait 	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual)

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		Agustus	1. Sosialisasi dan pendampingan kepada pemohon, dinas atau pemda setempat terkait dengan produk yang akan diajukan atau sedang dalam proses 2. Terbentuknya Pokja Penguatan kelembagaan dan pengawasan di daerah melalui SK yang ditandatangani oleh Kakanwil/ Gubernur 3. Menyusun Pedoman dan Standar Pengawasan IG di Daerah dengan Berkoordinasi pemerintah daerah (dinas terkait), atau stakeholder terkait lainnya yang ada di daerah	1. Laporan Hasil Koordinasi 2. SK Pokja per wilayah 3. Dokumen Pedoman dan Standar Pengawasan IG	
		September	Pengajuan permohonan Indikasi Geografis baru dan atau menyelesaikan minimal 1 permohonan Indikasi Geografis yang masih dalam proses	Bukti permohonan pendaftaran Indikasi Geografis	
		Desember	1. Berkoordinasi dengan pemda setempat terkait dengan potensi IG yang dapat diajukan permohonannya di tahun 2025 2. Tindak lanjut Pokja yang sudah terbentuk	1. Laporan Hasil Koordinasi dan daftar potensi IG tahun 2025 2. Laporan Tindak Lanjut Pokja	
Masih Rendahnya pemahaman masyarakat atas Merek Kolektif mengakibatkan rendahnya permohonan merek kolektif		Februari - Juni	Diseminasi Merek Kolektif	pemahaman terkait merek kolektif	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual)
		Juli s.d Nov	Pengajuan Permohonan Pendaftaran Merek Kolektif 1 wilayah 1 merek kolektif	Laporan dan Bukti Permohonan 1 Merek Kolektif	
		Desember	Monitoring dan evaluasi	laporan monev terhadap tindak lanjut di Tahun 2025	
Permohonan paten dalam negeri yang masih rendah dibandingkan dengan total permohonan paten, sehingga memerlukan upaya untuk mendorong permohonan baru dalam negeri melalui pemanfaatan informasi penelusuran dokumen paten pada 33 provinsi		Januari - Februari	Januari - Februari Koordinasi dan Pemetaan Calon Peserta	Laporan Koordinasi Laporan Calon Peserta Perlu Detail Informasi : - Kategori audiens - Lokasi tempat - Pembagian anggaran	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual)
		Maret - Agustus	Maret - Agustus Pelaksanaan kegiatan Asistensi Teknis Permohonan dan Penelusuran Dokumen Paten	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Asistensi Teknis Permohonan dan Penelusuran Dokumen Paten	
		September	September Evaluasi Kegiatan dan Rencana Tindak Lanjut	Laporan Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut Kegiatan Asistensi Teknis Permohonan dan Penelusuran Dokumen Paten	
Persentase permohonan paten dalam negeri yang tidak bisa digrant yang tinggi, sehingga memerlukan upaya untuk pendampingan penyusunan dokumen permohonan paten yang baik dan benar kepada para calon pemohon paten (asistensi Drafting Paten)		Maret - April	Maret - April Koordinasi dan Pemetaan Calon Peserta	Laporan Koordinasi Laporan Calon Peserta	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual)
		Mei - Oktober	Mei - Oktober Pelaksanaan Kegiatan Asistensi Teknis Paten Drafting	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Asistensi Teknis Paten Drafting	
		November	November Evaluasi Kegiatan dan Rencana Tindak Lanjut	Laporan Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut Kegiatan Asistensi Teknis Paten Drafting	
Tren permohonan desain industri beberapa tahun terakhir mengalami stagnasi dan penurunan di dalam negeri, serta mulai munculnya beberapa permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan mekanisme perlindungan desain industri		Januari	B01 : - koordinasi dengan Stakeholder terkait - Membentuk Tim Inventarisasi Data Potensi Desain Industri SK Tim	B01 : - Laporan koordinasi - SK Tim	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual)
		Februari	B02 : Koordinasi DJKI dan Kanwil Kumham secara virtual, dimana DJKI akan menyampaikan petunjuk pelaksanaan inventarisasi data potensi desain industri Laporan pertemuan virtual yang dilampiri dengan dokumentasi	B02 : Laporan pertemuan virtual yang dilampiri dengan dokumentasi	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		Maret	B03 : Melaksanakan rapat persiapan rencana aksi inventarisasi data potensi desain industri Laporan yang dilampiri notula rapat dan dokumentasi	B03 : Laporan yang dilampiri notula rapat dan dokumentasi	
		April-Mei	B04 – B05 : Melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan di wilayah masing-masing Laporan kordinasi yang dilampiri dokumentasi	B04 – B05 : Laporan kordinasi yang dilampiri dokumentasi	
		Juni-Juli	B06 – B07 : Melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi desain industri sektor industri kreatif Laporan kegiatan yang dilampiri dokumentasi	B06 – B07 : Laporan kegiatan yang dilampiri dokumentasi	
		Agustus-September	B08 – B09 : Melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi desain industri sektor pendidikan Laporan kegiatan yang dilampiri dokumentasi	B08 – B09 : Laporan kegiatan yang dilampiri dokumentasi	
		Oktober	B10 : Melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi desain industri sektor asosiasi pengusaha atau industri Laporan kegiatan yang dilampiri dokumentasi	B10 : Laporan kegiatan yang dilampiri dokumentasi	
		November	B11 : Menyampaikan hasil inventarisasi potensi desain industri ke DJKI Laporan Potensi Desain Industri di wilayah	Laporan Potensi Desain Industri di wilayah	
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN					
3	Kualitas penataan regulasi yang belum merata dibuktikan dengan tingkat partisipasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penilaian IRH belum optimal	Januari - Februari	Sosialisasi Indeks Reformasi Hukum kepada Pemerintah Daerah	Laporan Sosialisasi Indeks Reformasi Hukum	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Sub Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia)
		Maret	Pembinaan dan Pendampingan Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah	
		April-Agustus	1. Monitoring pengunggahan data dukung dan verifikasi penilaian mandiri oleh Pemerintah Daerah pada aplikasi penilaian Indeks Reformasi Hukum 2. Verifikasi faktual dan validasi data dukung hasil penilaian mandiri Pemerintah Daerah	1. Laporan Hasil Monitoring pengunggahan data dukung dan verifikasi penilaian mandiri oleh Pemerintah Daerah 2. Laporan Hasil verifikasi faktual dan validasi data dukung hasil penilaian mandiri Pemerintah Daerah	
		November-Desember	Evaluasi pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum di Wilayah	Laporan Evaluasi pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum di Wilayah	

MATRIK CAPAIAN RENCANA AKSI BIDANG PEMASYARAKATAN TAHUN 2024

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
KANWIL					
1	Pemenuhan Hak Integrasi Warga Binaan Pemasyarakatan di wilayah	Januari	1) - Pemetaan kebutuhan PK dan APK pada Lapas dan Rutan.	1) -Laporan Pemetaan kebutuhan PK dan APK pada Lapas dan Rutan.	Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak
			2) Pembentukan Tim Pelaksana SPPT TI Wilayah Tahun 2024	2) SK Tim Pelaksana SPPT TI Wilayah Tahun 2024	Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerjasama
			3) Pemetaan terhadap Lapas yang berpotensi menjadi lapas produktif	3) Laporan Pemetaan terhadap Lapas yang berpotensi menjadi lapas produktif.	Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerjasama
		Februari	1) - Pemetaan kebutuhan PK dan APK pada Lapas dan Rutan.	1) -Laporan Pemetaan kebutuhan PK dan APK pada Lapas dan Rutan.	Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerjasama
			3) Penetapan terhadap Lapas yang berpotensi menjadi lapas produktif (pilloting)	3) Laporan Penetapan terhadap Lapas yang berpotensi menjadi lapas produktif (pilloting)	Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerjasama
		Maret	1) -Sosialisasi terkait Penetapan wilayah pilloting serta mekanisme dan sistem kerja PK dan APK pada Lapas/ Rutan	1) laporan Sosialisasi terkait Penetapan wilayah pilloting serta mekanisme dan sistem kerja PK dan APK pada Lapas/ Rutan (pilloting)	Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerjasama
			3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di UPT Piloting	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di UPT Piloting;	Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerjasama
		April	1) -Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan;	1) - Laporan Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan;	Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerjasama
			3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah ;	Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerjasama
		Mei	1)- Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK yang mel di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan; - Sosialisasi hasil kajian dan urgensi pelaksanaan Litmas online serta pelaksanaan diskusi bersama pemangku kepentingan terkait.	1) - Laporan Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan; - Laporan Sosialisasi hasil kajian dan urgensi pelaksanaan Litmas online serta pelaksanaan diskusi bersama pemangku kepentingan terkait	Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerjasama

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI	HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah ;	Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerjasama
	Juni	1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi PK dan APK pada Lapas dan Rutan wilayah piloting;.	1) Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi PK dan APK pada Lapas dan Rutan wilayah piloting.	Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak
		2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerjasama
		3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi;	3) Laporan Monitoring dan Evaluasi	Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerjasama
	Juli	1) -Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasarakatan;	1) - Laporan Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasarakatan;	Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak
		2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerjasama
		3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah;	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah ;	Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerjasama
	Agustus	1) -Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasarakatan:	1) - Laporan Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasarakatan;	Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak
		2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerjasama
		3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah;	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah;	Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerjasama
	September	1) -Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasarakatan; - Sosialisasi SOP Litmas Online	1) - Laporan Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasarakatan; - Laporan Sosialisasi SOP Litmas Online	Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak
		2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerjasama
		3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah;	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah ;	Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerjasama
	Oktober	1) Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasarakatan; - Sosialisasi SOP Litmas Online	1) -Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasarakatan; - Laporan Sosialisasi SOP Litmas Online	Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak
		2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerjasama
		3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah;	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah;	Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerjasama

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		November	1) -Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasarakatan; - Sosialisasi SOP Litmas Online	1) -Laporan Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasarakatan; - Laporan Sosialisasi SOP Litmas Online	Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerjasama
			3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah;	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah	Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerjasama
		Desember	1) Monitoring dan Evaluasi tugas dan fungsi PK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasarakatan;	1) Laporan Monitoring dan Evaluasi tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasarakatan.	Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerjasama
			3) -Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi;	3) -Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi;	Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerjasama

MATRIK CAPAIAN RENCANA AKSI BIDANG IMIGRASI 2024

No	Isu Permasalahan Tusi	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
20	Perluasan pelayanan e-Paspor di seluruh kantor imigrasi.	Januari - Maret	1. Rapat Persiapan Perluasan pelayanan e-paspor 2. Penetapan Kantor Imigrasi penerbit e-Paspor 3. Rapat Pembahasan Pengaturan Distribusi Blangko dan Kuota Penerbitan Paspor Biasa Elektronik pada Kantor Imigrasi 4. Sosialisasi Perluasan pelayanan e-paspor	1. Notula Rapat Persiapan 2. Penetapan Kantor Imigrasi penerbit e-Paspor 3. Notula Rapat Pembahasan 4. Laporan sosialisasi	Sub Bidang Perizinan Keimigrasian dan Sub Bidang Informasi Keimigrasian
		April - Juni	Pemantauan Perluasan pelayanan e-paspor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Laporan Pemantauan Perluasan pelayanan e-paspor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
		Juli - September	Pemantauan Perluasan pelayanan e-paspor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Laporan Pemantauan Perluasan pelayanan e-paspor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
		Oktober - Desember	Pemantauan Perluasan pelayanan e-paspor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Laporan Pemantauan Perluasan pelayanan e-paspor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
21	Tingginya demand paspor belum dapat diimbangi dengan kapasitas produksi	Januari- Maret	1. Melakukan pemetaan analisa kebutuhan pelayanan paspor dalam di unit satuan kerja 2. Penambahan kuota merujuk pada hasil pemetaan analisa kebutuhan	1. Peta analisa kebutuhan pelayanan paspor dalam di unit satuan kerja 2. Penambahan kuota merujuk pada hasil pemetaan analisa kebutuhan	Sub Bidang Perizinan Keimigrasian
		April-Juni	Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pengawasan Pelaksanaan TugasTeknis Peningkatan Penerbitan Paspor pada Kantor Imigrasi di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Laporan Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pengawasan Pelaksanaan TugasTeknis Peningkatan Penerbitan Paspor pada Kantor Imigrasi di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
		Juli-September	Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pengawasan Pelaksanaan TugasTeknis Peningkatan Penerbitan Paspor pada Kantor Imigrasi di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Laporan Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pengawasan Pelaksanaan TugasTeknis Peningkatan Penerbitan Paspor pada Kantor Imigrasi di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
		Oktober - Desember	Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pengawasan Pelaksanaan TugasTeknis Peningkatan Penerbitan Paspor pada Kantor Imigrasi di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Laporan Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pengawasan Pelaksanaan TugasTeknis Peningkatan Penerbitan Paspor pada Kantor Imigrasi di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
22	Meningkatnya kasus TPPO dan TPPM lintas negara	Januari-Desember	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat (<i>awareness</i>) melalui pengayaan (<i>enrichment</i>) fungsi desa binaan imigrasi 2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait	1. Laporan Kegiatan 2. Laporan Koordinasi	Sub Bidang Intelijen Keimigrasian
23	Pengawasan dan penindakan keimigrasian belum optimal	Januari- Maret	1. Pengetatan target sasaran 2. Pengetatan pengendalian petugas	1. Laporan Pengetatan sasaran 2. Laporan Pengendalian Petugas	Sub Bidang Penindakan Keimigrasian
		April-Juni	Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait	Laporan Koordinasi	
		Juli-September	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung	Laporan Peningkatan sarana dan prasarana pendukung	
		Oktober - Desember	Evaluasi pelaksanaan tugas	Laporan Evaluasi	

LAMPIRAN I

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor : M.HH-01.OT.01.01 TAHUN 2024

Tanggal : 11 Januari 2024

**RENCANA AKSI BIDANG ADMINISTRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2024**

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI	HASIL	PENANGGUNG JAWAB	
SEKRETARIAT JENDERAL					
1	Evaluasi terhadap capaian kinerja tidak dilakukan seluruh salkor secara periodik	Januari - Februari	Pendampingan penyusunan LKJIP	1. LKJIP Kemenkumham Tahun 2023 2. LKJIP UKE 1 Tahun 2023 3. LKJIP Kantor Wilayah Tahun 2023 4. LKJIP UPT Tahun 2023	Biro Perencanaan APIP Unit Eselon I Kantor Wilayah
		Januari - Juli	Pengembangan Aplikasi E-Performance	Aplikasi E-Performance dapat digunakan	Pusdatin
		Maret - Agustus	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP	Laporan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023	Biro Perencanaan Unit Eselon I
		Maret	Penilaian Mandiri atas SAKIP Kantor Wilayah dan UPT	Laporan Penilaian Mandiri Kantor Wilayah dan UPT	Biro Perencanaan
		April	Verifikasi atas Penilaian Mandiri SAKIP Kantor Wilayah	Laporan Verifikasi atas Penilaian Mandiri SAKIP Kantor Wilayah	Biro Perencanaan

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		Agustus- Desember	Sosialisasi Aplikasi E-Performance dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Laporan Sosialisasi Aplikasi E-Performance dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Biro Perencanaan
2	Belum terintegrasinya sistem pengelolaan SDM di Kemenkumham dan BKN	Januari - Februari	Persiapan Integrasi sistem pengelolaan SDM antara Kemenkumham dan BKN (Jan - Feb)	Laporan Persiapan integrasi sistem pengelolaan SDM antara Kemenkumham dan BKN	Biro SDM Pusdatin
		Maret - Juni	Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kompetensi di Kemenkumham pada Simpeg (Maret-Juni)	Laporan Monev terhadap pelaksanaan pengembangan kompetensi di Kemenkumham pada Simpeg	Biro SDM
		Maret - Juni	Tindaklanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kompetensi di Kemenkumham pada Simpeg (Maret - Juni)	Laporan Tindaklanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kompetensi di Kemenkumham pada Simpeg	Biro SDM
3	Data pengembangan kompetensi Kemenkumham yang belum dilakukan secara keseluruhan	Januari- Februari	Pemutakhiran Data 2023 Indikator : (Data Kualifikasi Pendidikan, Data Kompetensi, Data Kinerja, Data Disiplin)	Laporan hasil pemutakhiran data 2023	Biro SDM Unit Eselon I Kanwil UPT

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		Januari- Februari	2. Pemetaan Data 2025 (Data Kualifikasi Pendidikan, Data Kompetensi, Data Kinerja, Data Disiplin)	Laporan pemetaan data 2025	Biro SDM Unit Eselon I Kanwil UPT
		Januari- Februari	3. Sosialisasi pemenuhan / peningkatan indeks Profesionalitas ASN	Laporan Sosialisasi pemenuhan / peningkatan indeks Profesionalitas ASN	Biro SDM
		Januari	1. Review pelaksanaan penilaian kompetensi dan pelatihan 2024 (Jan)	1. Kalender kegiatan	BPSDM
		Februari - Desember	2. Pelaksanaan penilaian kompetensi dan pelatihan dengan target (Kompetensi 14.520 orang, Pelatihan 55.635 orang)	Surat Keputusan penyelenggaraan penilaian kompetensi dan pelatihan	BPSDM
		Februari - Desember	Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penilaian kompetensi dan pelatihan	Laporan hasil pelaksanaan	BPSDM
		Januari - Desember	Implementasi Corporate University di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham minimal 25%	Laporan triwulan implementasi Corporate University di	Kantor Wilayah dan UPT

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
			pegawai per triwulan (Januari s/d Desember)	lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham	
4	Belum optimalnya nilai Indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran sehingga berpengaruh terhadap capaian IKPA	Januari - Maret	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023; 2. Pemberian Penghargaan Nilai IKPA Terbaik tingkat UKE1 dan Kantor Wilayah; 3. Langkah-Langkah Strategis Tahun 2024. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023; 2. Penghargaan Nilai IKPA Terbaik tingkat UKE1 dan Kantor Wilayah; 3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal mengenai Langkah-Langkah Strategis Tahun 2024 	Biro Keuangan
		April - Juni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Triwulan I TA 2024; 2. Tindak Lanjut Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2024. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Triwulan I TA 2024; 2. Surat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2024 kepada Kantor Wilayah. 	Kantor Wilayah dan UPT
		Juli - September	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Semester I TA 2024; 2. Tindak Lanjut Evaluasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Semester I TA 2024. 	Kantor Wilayah dan UPT

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
			Pelaksanaan Anggaran Semester I TA 2024.	2 Surat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester I TA 2024 kepada Kantor Wilayah.	
		Oktober - November	1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Triwulan III TA 2024; 2. Tindak Lanjut Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III TA 2024.	1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Triwulan III TA 2024; 2. Surat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III TA 2024 kepada Kantor Wilayah.	Kantor Wilayah dan UPT
5	Satuan Kerja Tidak Menyampaikan Usulan RKBMN	Juni - Juli	Kantor Wilayah melakukan pendampingan Pra Penyusunan RKBMN	Laporan Kegiatan Pra Penyusunan RKBMN	Kantor Wilayah
		Juli - Agustus	Melaksanakan Kegiatan Pra Penyusunan (Penguatan) Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara	Laporan Kegiatan Pra Penyusunan RKBMN	Biro Pengelolaan BMN dan Pengadaan Barang/Jasa
6	Satuan kerja belum menyampaikan Laporan Wasdal tepat waktu dan belum sesuai ketentuan	Jan-Mei	Sosialisasi Penyusunan Laporan Wasdal Tingkat Wilayah	Laporan Sosialisasi Penyusunan Laporan Wasdal	Biro Pengelolaan BMN dan Pengadaan Barang/Jasa
		Januari dan Juli	Menyusun Laporan Wasdal tingkat Wilayah Semester II Tahun 2023 dan Semester I Tahun 2024	Laporan Wasdal tingkat Wilayah Semester II Tahun 2023 dan Semester I Tahun 2024	Kantor Wilayah

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
7	Belum optimalnya kualitas nilai pengawasan kearsipan internal dalam pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Januari - Juni	Pembuatan aplikasi sistem pengawasan pengendalian pengelolaan kearsipan	Aplikasi sistem pengawasan pengendalian pengelolaan kearsipan Dimungkinkan penambahan fitur aplikasi E-RB	Pusdatin dan Biro Umum
		Januari	Melaksanakan sosialisasi pengisian formulir audit sistem kearsipan internal	Laporan pelaksanaan sosialisasi pengisian formulir audit sistem kearsipan internal	Biro Umum
		Januari	Membuat SK Tim Pengawasan	SK TIM Pengawasan arsip Kantor Wilayah	Kantor Wilayah
		Januari - Juni	Implementasi pengawasan kearsipan internal sesuai dengan LKE	Laporan implementasi pengawasan kearsipan internal	Kantor Wilayah
		Juli - Desember	Monitorng dan evaluasi hasil dari pelaksanaan pengawasan kearsipan internal	Laporan monev dan rekomendasi hasil pengawasan kearsipan internal	Kantor Wilayah dan Biro Umum
8	Penyelenggaraan Aplikasi Khusus di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum sesuai ketentuan Pasal 36 dan Pasal 39 Permenkumham	Januari	1. Membuat Surat Pendataan Aplikasi Khusus pada UKE-1, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis 2. Membentuk Tim Verifikator Aplikasi Khusus	1. Surat Pendataan Aplikasi Khusus pada UKE-1, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis 2. SK Tim Verifikator Aplikasi Khusus	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
	<p>30/2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>	<p>Februari-April</p>	<p>Melakukan pendataan Aplikasi Khusus di lingkungan Sekretariat Jenderal melalui aplikasi Simdatn</p>	<p>Dokumen data Aplikasi Khusus di lingkungan Sekretariat Jenderal</p>	
<p>Maret-Oktober</p>	<p>Verifikasi Aplikasi Khusus oleh Pusdatin terhadap aplikasi yang telah diverifikasi oleh UKE-1 melalui aplikasi Simdatn</p>	<p>Screenshot Hasil Verifikasi Aplikasi Khusus yang lulus verifikasi oleh UKE-1</p>			
<p>November</p>	<p>Menyusun draf Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyelenggaraan Aplikasi Khusus di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>	<p>Draf Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyelenggaraan Aplikasi Khusus di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>			
		<p>Februari-April</p>	<p>Melakukan pendataan Aplikasi Khusus di lingkungan Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis melalui aplikasi Simdatn</p>	<p>Dokumen data Aplikasi Khusus di lingkungan Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis</p>	<p>Kepala Kantor Wilayah</p>
<p>Maret-Juni</p>	<p>Melaksanakan rekomendasi hasil verifikasi dan uji kelaikan keamanan oleh Pusdatin</p>	<p>Dokumen perbaikan aplikasi</p>			
		<p>Februari-April</p>	<p>Melakukan pendataan Aplikasi di lingkungan Badan Strategi</p>	<p>Dokumen data Aplikasi Khusus di lingkungan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM</p>	<p>Kepala Pusat Strategi Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
			Kebijakan Hukum dan HAM melalui aplikasi Simdatin		
		Maret-Juni	Verifikasi Aplikasi Khusus yang memiliki fungsionalitas berkaitan dengan tugas dan fungsi Strategi Kebijakan Hukum dan HAM melalui aplikasi Simdatin	Screenshot Hasil Verifikasi Aplikasi Khusus yang memiliki fungsionalitas berkaitan dengan tugas dan fungsi Strategi Kebijakan Hukum dan HAM	
		Februari-April	Melakukan pendataan Aplikasi di lingkungan Inspektorat Jenderal melalui aplikasi Simdatin	Dokumen data Aplikasi Khusus di lingkungan Inspektorat Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal
		Maret-Juni	Verifikasi Aplikasi Khusus yang memiliki fungsionalitas berkaitan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal melalui aplikasi Simdatin	Screenshot Hasil Verifikasi Aplikasi Khusus yang memiliki fungsionalitas berkaitan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal	
		Februari-April	Melakukan pendataan Aplikasi di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui aplikasi Simdatin	Dokumen data Aplikasi Khusus di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional	Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional
		Maret-Juni	Verifikasi Aplikasi Khusus yang memiliki fungsionalitas berkaitan dengan tugas dan fungsi	Screenshot Hasil Verifikasi Aplikasi Khusus yang memiliki fungsionalitas berkaitan dengan	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
			Pembinaan Hukum Nasional melalui aplikasi Simdatin	tugas dan fungsi Pembinaan Hukum Nasional	
		Februari-April	Melakukan pendataan Aplikasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui aplikasi Simdatin	Dokumen data Aplikasi Khusus di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretans BPSDM Hukum dan HAM
		Maret-Juni	Verifikasi Aplikasi Khusus yang memiliki fungsionalitas berkaitan dengan tugas dan fungsi Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui aplikasi Simdatin	Screenshot Hasil Verifikasi Aplikasi Khusus yang memiliki fungsionalitas berkaitan dengan tugas dan fungsi Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Februari-April	Melakukan pendataan Aplikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan melalui aplikasi Simdatin	Dokumen data Aplikasi Khusus di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan	Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasarakatan
		Maret-Juni	Verifikasi Aplikasi Khusus yang memiliki fungsionalitas berkaitan dengan tugas dan fungsi Pemasarakatan melalui aplikasi Simdatin	Screenshot Hasil Verifikasi Aplikasi Khusus yang memiliki fungsionalitas berkaitan dengan tugas dan fungsi Pemasarakatan	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		Februari- April	Melakukan pendataan Aplikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui aplikasi Simdatin	Dokumen data Aplikasi Khusus di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi	Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian
Maret-Juni	Verifikasi Aplikasi Khusus yang memiliki fungsionalitas berkaitan dengan tugas dan fungsi Keimigrasian melalui aplikasi Simdatin	Screenshot Hasil Verifikasi Aplikasi Khusus yang memiliki fungsionalitas berkaitan dengan tugas dan fungsi Keimigrasian			
		Februari- April	Melakukan pendataan Aplikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui aplikasi Simdatin	Dokumen data Aplikasi Khusus di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	Direktur Teknologi Informasi AHU
Maret-Juni	Verifikasi Aplikasi Khusus yang memiliki fungsionalitas berkaitan dengan tugas dan fungsi Administrasi Hukum Umum melalui aplikasi Simdatin	Screenshot Hasil Verifikasi Aplikasi Khusus yang memiliki fungsionalitas berkaitan dengan tugas dan fungsi Administrasi Hukum Umum			
		Februari- April	Melakukan pendataan Aplikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan melalui aplikasi Simdatin	Dokumen data Aplikasi Khusus di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Direktur Pengundangan, Penegemahan dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan